

KLIPING BERITA

Sumber : Lombok Post

21 Mei 2022

Belum Diikuti LPJ Valid, Pengelolaan Dana BOS Kembali Jadi Temuan BPK NTB

Editor: Redaksi 5  21 Mei 2022



Kepala Dinas Dikbud NTB Aidy Furqan

MATARAM-Penggunaan dana bantuan operasional (BOS) di bawah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB kembali jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

”Di sana sini masih belum tertib,” kata Kepala BPK NTB Ade Iwan Rusmana, Jumat (20/5).

Belum tertibnya disebabkan penggunaan dana BOS tidak diikuti dengan pertanggungjawaban (LPJ) yang valid. Laporan yang terlambat. Hingga menyalahi ketentuan yang bukan peruntukannya.

Kata Ade, BPK akan mendorong pemprov untuk melakukan monitoring penggunaan dana BOS melalui aplikasi yang ditetapkan. "Kita juga merekomendasikan pengembalian kelebihan penggunaan yang bukan peruntukannya maupun yang menyalahi ketentuan," tegasnya.

Mengenai temuan dana BOS dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2022, Kepala Dinas Dikbud NTB Aidy Furqan menyebut pihaknya telah membahasnya bersama BPK. "Benar masuk temuan, ada di sejumlah sekolah," kata Aidy.

Aidy lantas mengungkapkan permasalahan sehingga membuat dana BOS masuk lagi dalam LHP BPK. Katanya, penggunaan dana BOS mengalami perubahan alokasi maupun besaran dananya. Contohnya, masih ada sekolah yang menggunakan dana BOS untuk honor guru.

Terjadi juga perubahan terhadap rencana anggaran biaya (RAB) di tengah perjalanan akibat kondisi. Salah satu yang mempengaruhi adalah kebijakan penanganan covid di NTB.

"Temuan dan catatan BPK ini tetap jadi landasan Dikbud untuk memperbaiki tata kelola manajemen BOS, supaya lebih bertanggung jawab," tuturnya.

Rencananya, dikbud akan membangun manajemen akuntabilitas pengelolaan dana BOS berbasis teknologi. Sejalan dengan itu, dilakukan juga pengawasan secara intensif, minimal per triwulan.

"Tim BOS sekolah juga kita bekali dengan manajemen yang baik, supaya tata kelola ke depannya lebih berkualitas," tandasnya.

Sementara itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyebut pengelolaan dana BOS bukan persoalan gampang. Apalagi menyangkut masyarakat kecil. "Belum lagi kalau ada perubahan-perubahan aturan dalam perjalanannya, sehingga butuh penyesuaian lagi," kata Gubernur. **(dit/r5)**